

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email : valentinequeen_chintary@yahoo.com

Abstract : *The role of rural government on institutional management is the foremost unit of society development. Especially Rural-Own Enterprises , as the government program that has to be empowered in order to realize the good socio-economic empowerment of society by prioritizing the society participation and initiatives. The goal of this research is to knowing the rural government role on managing Rural-Own Enterprises and to knowing the Rural-Own Enterprises programs of Bumiaji village, Batu. This research is kind of a qualitative method. The research sampling that used is a purposive sampling with the informants like the Headman of Bumiaji village, the village Secretary, the Village Chief of Banaran, Head of Government Affairs, Rural-Own Enterprises Administrators, Rural-Own Enterprises administrator, and two residents of Bumiaji village. The data collection technique that used by the researcher were an interview, observation, and documentation. While the data analysis method that used is descriptive. The results of this research prove that the rural government's role of Bumiaji village in managing Rural-Own Enterprises is, as the formation and development's institution of Rural-Own Enterprises, as the training mediator and motivator of the organization's member formation and also as the controller of Rural-Own Enterprises. The Bumiaji Village's Rural-Own Enterprises programs are the establishment of the Village Prosperity Agency , The Association of the Drinking Water Users , and the Arjuna Gelora Management Agency .*

Keywords: *Rural, Government Role, managing and Rural-Own Enterprises*

Abstrak : Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan informan yaitu Kepala Desa Bumiaji, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Banaran, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengurus BUMDES, Pengelola BUMDES dan sebanyak dua orang masyarakat desa Bumiaji. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, mengelola dan BUMDES

PENDAHULUAN

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Moch Solekhan (2014:51), Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya : melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Solekhan (2014:73), Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif Moleong (2012:6). Lokasi Penelitian di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Fokus dalam Penelitian ini Adanya Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bumdes, Program-program Bumdes. Jenis dan sumber data yaitu Data primer dan sekunder. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan informan yaitu Kepala Desa Bumiaji, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Banaran, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengurus BUMDES, Pengelola BUMDES dan sebanyak 2 orang masyarakat desa Bumiaji. Teknik pengumpulan data yang lakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Peneliti itu sendiri, Panduan Wawancara (*Interview Guide*), dan Catatan lapangan (*Field Note*). Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, Penyajian Data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian perlu ditetapkan keabsahan (*trustworthiness*) datanya, dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas. Untuk menguji Kredibilitas data/tingkat kepercayaan data tersebut peneliti menggunakan Triangulasi Teknik, yaitu dengan cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes

Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama BKD, HIPPAM dan BAPEGAR dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bumiaji seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa Bumiaji dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa Bumiaji menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga pengembangan BUMDes dirasakan lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada, tetapi masalah yang dihadapi pemerintah desa tidak sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan di desa Bumiaji karena dapat di komunikasikan antar pemerintah Desa dan Bumdes, karena BUMDes bertujuan

memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a) Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes.
- b) Peran pemerintah Desa sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap Pengurus BUMDes.
- c) Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- d) Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES sesuai standar operasional Prosedur (SOP).

Dantika dan Yanuardi (2013), tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya.

Program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu

Dari adanya kepengurusan BUMDes Desa Bumiaji periode 2014 – 2019 maka terbentuk berbagai usaha desa seperti HIPPAM, BKD dan BAPEGAR. Adapun BUMDes Desa Bumiaji yang memberdayakan masyarakat yaitu HIPPAM yang bertujuan menyelenggarakan tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Bumiaji dan menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Bumiaji. Menurut pendapat Kepala Desa Bumiaji menjelaskan bahwa dasar terbentuknya BUMDes yaitu “Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah desa sebagai mengawasi dana BUMDES dari masyarakat dan untuk masyarakat. Peran pemerintah desa dalam beberapa program BUMDes yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, permodalan dan pengembangan, adapun pemahaman dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perencanaan pendirian BUMDes dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, perangkat DESA, LPMD, ketua RW dan ketua RT, Karang Taruna, PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat.
- b) Pengorganisasian BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. BUMDes Desa Bumiaji yang dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan.
- c) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas. Badan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- d) Permodalan BUMDes swadaya masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Desa Bumiaji menjelaskan bahwa “Permodalan BUMDES secara patungan dengan modal awal sebesar Rp. 6.500.000”.
- e) Pengembangan BUMDes dilakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Jika kelembagaan BUMDes ini kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi

di perdesaan. Tujuan BUMDes untuk menetapkan strategi dan pola pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bumiaji di Kota Batu.

Dari hasil pembahasan yang sudah di paparkan maka dapat di pahami bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik desa (Bumdes), sudah baik dan dalam pengelolaan Bumdes sudah sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan, akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap Pentingnya Bumdes masih bersikap apatis, sedangkan untuk mengantisipasi dari keterlambatan pencairan dana yang digunakan untuk pengembangan Bumdes yaitu melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Bumiaji memberikan pinjaman dana untuk Bumdes tanpa bunga pinjaman dan angsuran pinjaman yang di berikan dari PAD dapat di angsur selama 1 tahun agar kegiatan Bumdes dapat berjalan dengan baik. Untuk itu pentingnya Bumdes bagi masyarakat, agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu

Landasan dasar peran pemerintah Desa Bumiaji yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa maka dalam pengelolaan BUMDes di dirikan melalui musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat Desa Bumiaji. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dipisahkan dari organisasi pemerintah Desa. Dari adanya BUMDes Desa Bumiaji maka program yang dibentuk seperti HIPPAM, BKD dan BAPEGAR. Prioritas BUMDes Desa Bumiaji lebih difokuskan pada bidang pengairan berupa memberikan air bersih pada masyarakat, seni/olahraga dan pengelolaan tanah kas desa yang digunakan untuk penyewaan lahan pertanian. Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes, sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan Desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pemerintah Desa Bumiaji sudah berperan penting dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDes karena program BUMDes mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Bumiaji.

2. Program BUMDES Di Desa Bumiaji Kota Batu Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat melalui program BUMDes tercermin pada proses pendirian, pengorganisasian, pengawasan dan permodalan sehingga terbentuk BKD, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Bumiaji, dan BAPEGAR. Program BUMDes sebagai dorongan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bumiaji yang lebih baik dengan membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pembangunan BUMDes yang berkelanjutan. BUMDes Desa Bumiaji berupa BKD bermanfaat dalam pengelola tanah Kas Desa, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) bermanfaat menyediakan air bersih untuk masyarakat dan BAPEGAR bermanfaat mengoptimalkan fungsi Gelora Arjuna Bumiaji untuk pembinaan olah raga dan kegiatan seni yang mampu meningkatkan Budaya masyarakat Desa Bumiaji.

SARAN

1. Pengelola BUMDes Desa Bumiaji

Pengelolaan BUMDes secara efektif mampu memberdayakan masyarakat Desa Bumiaji, dalam pengelolaan BUMDes maka peran pemerintah Desa Bumiaji perlu mempertahankan sumberdaya kepengurusan BKD, HIPPAM dan BAPEGAR agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan

kapasitas yang ada perlu dipelihara dan di jaga agar mampu memberdayakan masyarakat Desa Bumiaji yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan BUMDes Bumiaji

Pemberdayaan masyarakat perlu dipertahankan melalui program BUMDes seperti HIPPAM sebagai penyediaan air bersih untuk keberlangsungan hidup masyarakat terus dijalankan, BKD pengelolaan tanah kas Desa sebagai peningkatan pembangunan perkebunan masyarakat perlu dijaga, BAPEGAR sebagai penyedia sarana olahraga dan seni budaya perlu dirawat.

DAFTAR PUSTAKA

Dantika, Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat* di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Moleong, Lexy 2012, *Metode penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.